



Dugaan Penyimpangan Proyek Tukad Mati ✓ Giliran Kadis PUPR Badung yang Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Penyidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengerjaan proyek sandaran Tukad Mati di Legian, Kuta, Badung dilanjutkan dengan pemeriksaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IB Surya Suamba di Kejari Denpasar pada, Selasa (23/5).

Kajari Denpasar, Erna Noormawati mengatakan selain Kadis PUPR, Suamba, juga diperiksa sebagai saksi AA Gede Dalem, Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) I Gede Sumaradana. Erna menegaskan ketiganya diperiksa sebagai saksi. "Status ketiganya masih saksi," tegas Erna.

Ia mengatakan setelah pemeriksaan jajaran Dinas PUPR, pihaknya juga akan memeriksa penyedia barang dan jasa, serta rekanan yaitu dari CV Undagi Jaya Mandiri. Total saksi yang sudah diperiksa sekitar 11 orang. "Nanti saksi yang akan kita periksa mencapai 20 orang lebih," lanjut mantan Aspidsus Kejati Bali ini.

Ditambahkan, saat ini penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini. Di antaranya terkait volume dan kualitas proyek dikatakan tidak sesuai dengan speks. "Misalnya yang harus dilakukan satu berbanding empat, yang dikerjakan satu berbanding sepuluh," tambah Erna yang menduga ada

kerugian negara sekitar Rp 700 juta dalam kasus ini.

Sementara itu, Kadis PUPR, IB Surya Suamba belum bisa dikonfirmasi karena masih menjalani pemeriksaan hingga sore. Kasus ini sendiri berawal dari laporan warga yang mengatakan jika pembangunan sandaran Tukad Mati, Legian mengalami masalah. Pasalnya, baru saja selesai dan diserahterimakan, sudah ada beberapa bagian yang retak dan jebol. Proyek sandaran Tukad Mati tersebut membentang sepanjang 570 meter dengan anggaran Rp 2,1 miliar yang digarap oleh PT Undagi Jaya Mandiri sejak awal 2016 lalu. **rez**

Edisi : Rabu, 24 Mei 2017

Hal : 5



Dugaan Korupsi Bantuan Kapal Seleret

Kejati Tetapkan 4 Tersangka

Saat hendak diserahkan, ternyata kapal itu tidak sesuai dengan spesifikasinya.

SINGARAJA, NusaBali

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tujuh unit kapal seleret (Purse Sein) bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2014 senilai Rp 10,5 miliar, akhirnya menyeret sejumlah nama jadi tersangka. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, kini tengah merampungkan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) dan

gan memanggil kembali para saksi, Selasa (23/5).

Para saksi yang dipanggil adalah calon penerima bantuan di Buleleng. Mereka dimintai keterangannya kembali guna finalisasi BAP di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, Jalan Dewi Sartika Singaraja. Sedikitnya ada lima jaksa dari Kejati Bali turun memeriksa para saksi.

Dalam pemanggilan itu terungkap ada empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni I Gusti Ngurah Made Sumantri, Fuad Bachtiar Bauagi, Suyadi, dan Sudarsoyo.

Namun pihak tim dari Kejati Bali yang memeriksa kembali para saksi, enggan memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan para saksi dan penetapan tersangka dalam

kasus dugaan korupsi tersebut. Mereka beralih tidak punya kewenangan memberikan keterangan. "Maaf, pemeriksaan ini tertutup, dan kami tidak bisa memberikan keterangan apapun. Karena untuk keterangannya harus ke pimpinan (Kajati, Ted)," terang salah satu anggota rombongan Kejati Bali.

Demikian pula, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Singaraja Fahrur Rozy. Sebelum pemeriksaan dimulai, Kajari Fahrur Rozy sudah menolak memberikan keterangan dengan alasan bukan kewenangannya. "Jangan tanya gua ya, gua memang tidak tahu masalahnya," kata Fahrur Rozy.

Namun informasi di Kejari Singaraja menyebut, tersangka atas nama I Gusti Ngurah Made Sumantri merupakan pejabat



CALON penerima bantuan dari kelompok nelayan yang diperiksa sebagai saksi, Selasa (23/5), di Kantor PN Singaraja.

pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Kemudian tersangka Sudarsono merupakan

pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan dua nama tersangka lainnya Fuad Bachtiar Bauagi

dan Suyadi adalah pihak rekanan dari perusahaan pembuat kapal.

Tujuh unit kapal bantuan KKP Tahun 2014, masing-masing lima unit diberikan kepada lima kelompok nelayan di Buleleng. Dua unit lagi diberikan kepada kelompok nelayan di Denpasar. Nilai bantuan masing-masing unit kapal mencapai Rp 1,5 miliar. Lima

unit kapal untuk kelompok nelayan di Buleleng diberikan kepada Kelompok Nelayan Banyumandi di Desa Pejarakan, Bakti Kosgoro Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Pula Kerti di Desa Tegal Lenga, Hasil Laut Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, dan Kelompok Nelayan Arta Bakti Buana di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula. Dua unit kapal diser-

ahkan untuk kelompok nelayan di Pulau Serangan, Denpasar.

Dugaan tindak pidana korupsi itu mencuat setelah kelompok nelayan penerima bantuan menolak kapal bantuan tersebut, karena bantuan tidak sesuai dengan spesifikasi.

Kapal seleret itu terbilang kapal penangkap ikan cukup canggih, karena dilengkapi alat navigasi dan alat pemantau gerombolan ikan. Kapal tersebut memiliki kapasitas 30 gross ton dengan spesifikasi panjang 22 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 2 meter. Kapal ini menggunakan mesin 70 PK dengan peralatan tangkap jaring sepanjang 300 meter dan lebar 70 meter. Namun saat kapal bantuan hendak diserahkan ternyata kapal itu tidak sesuai dengan spesifikasinya. **k19**

Edisi : Rabu, 24 Mei 2017

Hal : 4